



Peran Nilai Lokal *To'o Jogho Waga Sama* dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Nagekeo (Studi Kasus pada Daerah Irigasi Mbay)

Maria Pango Wonda^{1*}, Laurensius P. Sayrani², Jim Briand Kolianan³, Jacob Wadu⁴

¹⁻⁴Universitas Nusa Cendana, Indonesia

E-mail: mirawonda1006@gmail.com¹, laurensiussayrani@staf.undana.ac.id²,
jim.kolianan@staf.undana.ac.id³, jacob.wadu@staf.undana.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: mirawonda1006@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the role of the local value To'o Jogho Waga Sama in improving public services in irrigation governance in Aesesa District, Nagekeo Regency. The research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation involving village governments, Water User Farmers Associations (P3A), traditional leaders, and farming communities. The findings reveal that the value of To'o Jogho Waga Sama plays an important role in building social trust, strengthening social networks, establishing collective norms, and enhancing the legitimacy of public services. The values of togetherness and mutual cooperation also encourage community participation in the construction and maintenance of irrigation channels without relying entirely on formal bureaucratic mechanisms. In addition, conflicts related to water distribution are resolved through customary deliberation and kinship-based approaches, which help maintain social harmony within the community. This study concludes that the local value of To'o Jogho Waga Sama represents a form of social capital that supports participatory, responsive, and sustainable public services based on local wisdom.*

Keywords: *Irrigation; Public Service; Public Value; Social Capital; To'o Jogho Waga Sama.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran nilai lokal *To'o Jogho Waga Sama* dalam meningkatkan pelayanan publik pada tata kelola irigasi di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi dengan melibatkan pemerintah desa, pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), tokoh adat, serta masyarakat petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *To'o Jogho Waga Sama* berperan penting dalam membangun kepercayaan sosial, memperkuat jaringan sosial, membentuk norma kolektif, serta meningkatkan legitimasi pelayanan publik. Nilai kebersamaan dan gotong royong juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tanpa bergantung sepenuhnya pada mekanisme birokrasi formal. Selain itu, penyelesaian konflik distribusi air dilakukan melalui musyawarah adat dan pendekatan kekeluargaan sehingga mampu menjaga keharmonisan sosial masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai lokal *To'o Jogho Waga Sama* merupakan modal sosial yang dapat mendukung terciptanya pelayanan publik yang partisipatif, responsif, dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

Kata Kunci: Irigasi; Modal Sosial; Pelayanan Publik; *Public Value*; *To'o Jogho Waga Sama*.

1. LATAR BELAKANG

Pelayanan publik merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta peningkatan kesejahteraan sosial. Kualitas pelayanan publik tidak hanya diukur melalui efektivitas birokrasi dan efisiensi administrasi, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam membangun partisipasi masyarakat pada setiap tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi layanan. Dalam konteks pemerintahan modern, pelayanan publik yang responsif menuntut adanya hubungan yang kolaboratif antara negara dan masyarakat agar tercipta legitimasi sosial terhadap kebijakan yang dijalankan.

Menurut Pantih (2019), pelayanan publik merupakan seluruh aktivitas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bentuk pemenuhan hak-hak warga negara. Sejalan dengan itu, Smith (2019) dalam Rukin et al. (2024) menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses pelayanan publik secara adil tanpa membedakan kondisi sosial maupun ekonomi. Perspektif tersebut diperkuat oleh konsep *public value* yang dikemukakan oleh Mark H. Moore, yang menempatkan legitimasi, partisipasi, transparansi, dan kebermanfaatan publik sebagai indikator utama keberhasilan pelayanan pemerintah.

Meskipun demikian, praktik pelayanan publik di berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi persoalan struktural dan sosial yang cukup kompleks. Kesenjangan antara harapan masyarakat dengan realitas penyelenggaraan pelayanan masih terlihat dalam bentuk distribusi layanan yang belum merata, rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta minimnya legitimasi sosial atas kebijakan pembangunan. Situasi tersebut juga tampak dalam konteks Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, namun dalam praktiknya masih muncul persepsi masyarakat bahwa sejumlah kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan serta belum mengakomodasi kebutuhan lokal secara optimal.

Salah satu contoh yang menunjukkan adanya persoalan legitimasi sosial dalam kebijakan publik di Kabupaten Nagekeo ialah polemik pembangunan Waduk Lambo. Penolakan sebagian masyarakat terhadap proyek tersebut memperlihatkan adanya jarak antara kebijakan pemerintah dan aspirasi warga. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan publik tidak semata-mata ditentukan oleh aspek administratif dan teknokratis, melainkan juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam memahami nilai sosial budaya yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan pelayanan publik berbasis kearifan lokal menjadi penting untuk memperkuat solidaritas sosial, membangun kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan partisipasi warga dalam proses pembangunan.

Dalam kehidupan sosial masyarakat Nagekeo dikenal suatu nilai budaya lokal yang disebut *To'o Jogho Waga Sama*. Istilah tersebut berasal dari bahasa daerah Aesesa, yaitu *To'o* yang berarti bersama atau bersatu, *Jogho* yang bermakna gotong royong atau saling membantu, serta *Waga Sama* yang berarti satu keluarga atau komunitas bersama. Nilai ini merepresentasikan semangat kebersamaan, solidaritas, tanggung jawab kolektif, dan kerja sama sosial yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Nagekeo.

Dalam perspektif teori modal sosial yang dikemukakan oleh Robert D. Putnam dan Francis Fukuyama, nilai *To'o Jogho Waga Sama* dapat dipahami sebagai bentuk modal sosial yang memperkuat jaringan sosial, rasa saling percaya, dan norma kerja sama dalam masyarakat. Modal sosial tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun partisipasi publik dan efektivitas pelayanan pemerintah. Sementara itu, berdasarkan kerangka public value dari Mark H. Moore, nilai lokal tersebut juga dapat dipandang sebagai ekspresi nilai publik karena mengandung unsur legitimasi sosial, partisipasi masyarakat, dan orientasi pada kepentingan bersama. Dengan demikian, *To'o Jogho Waga Sama* tidak hanya memiliki dimensi budaya, tetapi juga berpotensi menjadi landasan normatif dalam penguatan tata kelola pelayanan publik berbasis masyarakat.

Implementasi nilai *To'o Jogho Waga Sama* dapat ditemukan dalam berbagai praktik sosial masyarakat Kabupaten Nagekeo. Masyarakat di wilayah Mbay, misalnya, secara kolektif melakukan pembangunan dan perbaikan saluran irigasi primer maupun sekunder untuk mendukung aktivitas pertanian. Nilai tersebut juga tampak dalam musyawarah desa terkait penyaluran bantuan sosial serta partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi COVID-19. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa internalisasi nilai lokal mampu meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sehingga pelayanan publik menjadi lebih responsif dan partisipatif.

Namun demikian, nilai *To'o Jogho Waga Sama* tidak selalu menghasilkan dampak yang bersifat positif. Dalam kondisi tertentu, solidaritas sosial juga dapat menjadi dasar munculnya resistensi kolektif terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil atau merugikan masyarakat. Penolakan sebagian warga terhadap pembangunan Waduk Lambo menjadi salah satu bentuk manifestasi solidaritas sosial berbasis nilai lokal. Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai budaya lokal memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai instrumen penguat kohesi sosial sekaligus sebagai dasar mobilisasi sosial dalam menyuarakan kepentingan masyarakat.

Konteks tersebut terlihat secara nyata dalam pembangunan infrastruktur dasar, khususnya sistem irigasi di Kota Mbay. Infrastruktur irigasi memiliki posisi strategis bagi masyarakat Kabupaten Nagekeo karena sektor pertanian menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat. Dalam proses pembangunan irigasi, nilai *To'o Jogho Waga Sama* tercermin melalui keterlibatan masyarakat secara kolektif dalam kegiatan kerja bakti, pengelolaan saluran air, hingga pengawasan pembangunan. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, tetapi juga sebagai mitra aktif pemerintah dalam proses pembangunan.

Akan tetapi, pelaksanaan pembangunan irigasi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial, terutama ketika distribusi air dianggap tidak merata atau ketika masyarakat menilai adanya ketimpangan manfaat pembangunan. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh persepsi keadilan sosial dalam proses implementasinya. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur tidak dapat dipahami semata sebagai proyek teknis, melainkan juga sebagai ruang sosial yang memperlihatkan dinamika hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan nilai budaya lokal yang berkembang di dalamnya.

Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Mite (2022), lebih banyak menyoroti fungsi sosial dan politik nilai *To'o Jogho Waga Sama*. Namun, kajian mengenai relevansi nilai tersebut dalam praktik pelayanan publik, khususnya pada sektor pembangunan infrastruktur dasar, masih relatif terbatas. Padahal, integrasi nilai budaya lokal dalam pelayanan publik berpotensi menciptakan model tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, adaptif, dan sesuai dengan karakteristik sosial masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis bagaimana peran nilai lokal *To'o Jogho Waga Sama* dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Nagekeo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian pelayanan publik berbasis kearifan lokal serta menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif, partisipatif, dan berorientasi pada nilai budaya masyarakat lokal.

2. KAJIAN TEORITIS

Modal Sosial dalam Pelayanan Publik

Modal sosial (*social capital*) merupakan konsep yang menekankan pentingnya hubungan sosial, kepercayaan, dan norma dalam kehidupan masyarakat. Berbeda dengan modal ekonomi yang bersifat material, modal sosial lebih menekankan pada kualitas hubungan antarindividu maupun kelompok sosial.

Robert D. Putnam (1993) mendefinisikan modal sosial sebagai jaringan, norma, dan kepercayaan yang memudahkan masyarakat untuk bekerja sama demi mencapai kepentingan bersama. Sementara itu, Pierre Bourdieu (1986) memandang modal sosial sebagai sumber daya yang muncul dari hubungan sosial dan dapat dimanfaatkan individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan tertentu.

Menurut Francis Fukuyama (2000), modal sosial terdiri atas nilai dan norma informal yang memungkinkan terjadinya kerja sama sosial. Unsur utama dalam modal sosial adalah kepercayaan (*trust*), hubungan timbal balik (*reciprocity*), dan interaksi sosial yang berkelanjutan. Di sisi lain, James S. Coleman (1988) menjelaskan bahwa modal sosial merupakan bagian dari struktur sosial yang membantu individu mencapai tujuan bersama melalui jaringan dan norma sosial.

Secara umum, modal sosial terdiri atas tiga unsur utama, yaitu jaringan sosial, kepercayaan, dan norma sosial. Jaringan sosial memungkinkan masyarakat saling bekerja sama dan bertukar informasi. Kepercayaan menciptakan rasa aman dalam hubungan sosial, sedangkan norma berfungsi sebagai aturan yang mengatur perilaku masyarakat. Ketiga unsur tersebut menjadi dasar terbentuknya solidaritas sosial dan kerja sama dalam masyarakat.

Dalam pelayanan publik, modal sosial memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Adanya kepercayaan dan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik. Selain itu, masyarakat yang terlibat aktif dalam pelayanan publik cenderung lebih mudah mendukung kebijakan pemerintah dan menjaga kualitas layanan yang diberikan.

Konsep *Public Value*

Konsep *public value* pertama kali diperkenalkan oleh Mark H. Moore (1995) sebagai pendekatan yang menekankan bahwa keberhasilan pelayanan publik tidak hanya diukur dari efisiensi, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Nilai publik berkaitan dengan bagaimana pemerintah menciptakan pelayanan yang dianggap penting, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kelly dkk. dalam Naidoo dan Holtzhausen (2020) menjelaskan bahwa nilai publik muncul melalui kebijakan, pelayanan, dan regulasi pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Nilai publik tidak hanya berkaitan dengan hasil pelayanan, tetapi juga proses yang menciptakan kepercayaan dan keadilan sosial.

Menurut John Benington (2009), nilai publik bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat keadilan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup warga negara melalui pelayanan yang responsif dan inklusif. Selanjutnya, Timo Meynhardt (2009) menyatakan bahwa nilai publik berasal dari pengalaman dan persepsi masyarakat terhadap lembaga publik. Artinya, pelayanan publik dianggap bernilai apabila masyarakat merasa mendapatkan manfaat dan keadilan dari pelayanan tersebut.

Sementara itu, Barry Bozeman (2003) menekankan bahwa nilai publik berkaitan dengan kemampuan pemerintah memenuhi kepentingan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan publik tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada legitimasi, partisipasi, dan kepentingan bersama.

Dalam teori *public value*, Mark H. Moore (1995) menjelaskan tiga unsur penting, yaitu legitimasi publik, kapasitas organisasi, dan hasil pelayanan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketiga unsur tersebut menjadi dasar dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan dipercaya masyarakat.

Integrasi Modal Sosial dan *Public Value*

Teori modal sosial dan *public value* memiliki hubungan yang saling mendukung dalam pelayanan publik. Modal sosial menyediakan dasar berupa jaringan sosial, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat, sedangkan *public value* memastikan bahwa pelayanan publik memberikan manfaat dan legitimasi bagi masyarakat.

Integrasi kedua teori tersebut dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih responsif, partisipatif, dan berkelanjutan. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan kepada pemerintah dan dilibatkan dalam proses pelayanan, maka kualitas pelayanan publik akan semakin meningkat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kearifan Lokal dalam Pelayanan Publik

Kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan nilai, norma, dan pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Clifford Geertz (1983) menjelaskan bahwa kearifan lokal merupakan cara pandang masyarakat dalam memahami kehidupan sosial dan lingkungan sekitarnya. Kearifan lokal memiliki beberapa ciri utama, seperti bersifat adaptif, diwariskan lintas generasi, berlandaskan nilai dan norma sosial, serta berfungsi sebagai identitas budaya masyarakat. Selain itu, kearifan lokal juga berperan dalam memperkuat solidaritas sosial dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Dalam pelayanan publik, kearifan lokal dapat menjadi dasar dalam membangun hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Pelayanan publik yang memperhatikan budaya lokal cenderung lebih mudah diterima masyarakat karena sesuai dengan nilai dan kebutuhan sosial mereka.

Nilai Lokal *To'o Jogho Waga Sama*

To'o Jogho Waga Sama merupakan nilai budaya masyarakat Aesesa di Kabupaten Nagekeo yang menekankan kebersamaan, solidaritas, gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sosial. Nilai ini menjadi dasar penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat.

Dalam perspektif modal sosial, nilai *To'o Jogho Waga Sama* mencerminkan adanya jaringan sosial, norma, dan kepercayaan sebagaimana dijelaskan oleh Robert D. Putnam (1993) dan Francis Fukuyama (2000). Praktik gotong royong dan solidaritas sosial yang terkandung dalam nilai tersebut memperlihatkan kuatnya hubungan sosial masyarakat Nagekeo.

Dalam pelayanan publik, nilai *To'o Jogho Waga Sama* dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah. Nilai kebersamaan tersebut mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses pelayanan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan. Selain itu, nilai lokal ini juga memperkuat legitimasi pelayanan publik karena pelayanan yang diberikan sesuai dengan budaya dan kebutuhan masyarakat setempat.

Secara teoritis, peran nilai *To'o Jogho Waga Sama* dalam pelayanan publik dapat dilihat melalui tiga dimensi, yaitu dimensi normatif, fungsional, dan simbolik. Dimensi normatif berkaitan dengan nilai moral dan etika pelayanan, dimensi fungsional berkaitan dengan peningkatan partisipasi dan kerja sama masyarakat, sedangkan dimensi simbolik berkaitan dengan penguatan identitas budaya masyarakat dalam pelayanan publik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam penerapan nilai lokal *To'o Jogho Waga Sama* dalam pelayanan publik di Kabupaten Nagekeo. Menurut Lexy J. Moleong (2006), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial secara holistik melalui pengamatan terhadap perilaku, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian. Sementara itu, Sugiyono (2021) menyatakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lokasi penelitian dipilih karena nilai lokal *To'o Jogho Waga Sama* masih hidup dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam kegiatan pelayanan publik dan tata kelola irigasi. Fokus penelitian diarahkan pada peran nilai lokal *To'o Jogho Waga Sama* dalam meningkatkan pelayanan publik, khususnya pada aspek kepercayaan (*trust*), jaringan sosial (*network*), norma sosial (*norms*), serta legitimasi dan dukungan publik dalam pengelolaan irigasi masyarakat.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang dianggap memahami masalah penelitian. Informan penelitian berjumlah tujuh orang yang terdiri atas tokoh adat, kepala desa, pengurus P3A, petani, dan masyarakat umum yang terlibat langsung dalam tata kelola irigasi serta penerapan nilai *To'o Jogho Waga Sama*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik gotong royong, distribusi air irigasi, dan kegiatan pelayanan publik masyarakat. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur agar peneliti dapat menggali pengalaman dan pandangan informan mengenai penerapan nilai lokal dalam pelayanan publik. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa foto kegiatan, laporan desa, dan dokumen pendukung lainnya.

Analisis data menggunakan model interaktif Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (2014) yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dipilih, dikelompokkan, dan disusun secara sistematis agar mudah dipahami. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi pustaka. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta mencocokkannya dengan teori modal sosial dari Robert D. Putnam (1993) dan teori *public value* dari Mark H. Moore (1995).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran nilai lokal *To'o Jogho Waga Sama* dalam meningkatkan pelayanan publik, khususnya pada tata kelola irigasi di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi lapangan yang melibatkan kepala desa, pengurus P3A, tokoh adat, ketua kelompok tani, serta petani hulu dan hilir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai lokal *To'o Jogho Waga Sama* memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan sosial, memperkuat jaringan sosial, membentuk norma kolektif, serta meningkatkan legitimasi pelayanan publik dalam pengelolaan irigasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa nilai budaya lokal tidak hanya berfungsi sebagai identitas sosial masyarakat, tetapi juga menjadi mekanisme sosial yang mendukung efektivitas pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat.

Kepercayaan (*Trust*) dalam Tata Kelola Irigasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan menjadi fondasi utama dalam tata kelola irigasi di Kecamatan Aesesa. Kepercayaan masyarakat dibangun melalui nilai-nilai adat seperti *Jogho Mézé*, *Péna Sama*, dan *Ata Téi* yang menekankan kebersamaan, tanggung jawab bersama, serta penghormatan terhadap kesepakatan kolektif. Nilai tersebut memungkinkan

masyarakat mengelola distribusi air secara bersama tanpa ketergantungan penuh pada mekanisme birokrasi formal.

Kepercayaan masyarakat terlihat dalam proses penyelesaian konflik distribusi air yang terjadi pada musim kemarau tahun 2023 di kawasan Pintu Munde. Konflik muncul akibat ketidakseimbangan distribusi air antara petani hulu dan hilir. Dalam penyelesaiannya, masyarakat lebih mengutamakan pendekatan musyawarah dan rekonsiliasi sosial dibandingkan penggunaan sanksi administratif. Penyelesaian konflik dilakukan melalui forum bersama yang melibatkan seluruh pihak terkait sehingga tercapai kesepakatan distribusi air yang dianggap lebih adil oleh masyarakat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa nilai *To'o Jogho Waga Sama* mampu membangun rasa saling percaya dan solidaritas sosial dalam pengelolaan sumber daya bersama. Hal ini sejalan dengan teori modal sosial Robert D. Putnam (1993) dan Francis Fukuyama (2000) yang menegaskan bahwa kepercayaan sosial menjadi dasar terciptanya kerja sama kolektif dalam masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Ganarditya (2021) yang menyatakan bahwa transparansi dan musyawarah berbasis nilai lokal mampu meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Musyawarah Desa sebagai Sarana Pemulihan Kepercayaan

Penelitian menemukan bahwa forum musyawarah desa atau “duduk minum kopi” menjadi sarana utama dalam memulihkan hubungan sosial masyarakat ketika terjadi konflik distribusi air. Forum ini melibatkan seluruh unsur masyarakat, mulai dari pemerintah desa, pengurus P3A, petani hulu, petani hilir, hingga tokoh adat. Musyawarah dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat memiliki ruang yang setara untuk menyampaikan pendapat dan keluhan mereka.

Melalui forum tersebut, konflik tidak dipandang sebagai persoalan individu semata, tetapi sebagai masalah bersama yang harus diselesaikan secara kolektif demi menjaga keharmonisan sosial masyarakat. Pendekatan ini menciptakan rasa aman bagi masyarakat karena setiap warga memperoleh kesempatan yang sama untuk didengar dalam proses pengambilan keputusan.

Temuan ini relevan dengan teori *public value* Mark H. Moore (1995) yang menekankan pentingnya legitimasi dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Selain itu, hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian Wardaniah (2022) yang menunjukkan bahwa pelayanan publik yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat mampu memperkuat legitimasi pemerintah daerah.

Jaringan Sosial (*Network*) dalam Pelayanan Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan sosial masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung pelayanan publik berbasis partisipasi. Dalam masyarakat Nagekeo, jaringan sosial dibangun melalui hubungan kekerabatan, gotong royong, dan solidaritas sosial yang diwujudkan melalui nilai *Sao Kéda*, *Anak Rona-Anak Wina*, dan *Nua Kéda*.

Jaringan sosial tersebut mempermudah koordinasi masyarakat dalam penyelesaian konflik, distribusi air, dan pelaksanaan kerja bakti irigasi. Tokoh adat memiliki peran strategis sebagai mediator yang menghubungkan kelompok-kelompok masyarakat ketika terjadi perbedaan kepentingan. Keberadaan tokoh adat membuat masyarakat lebih mudah menerima keputusan bersama karena proses penyelesaian dilakukan melalui pendekatan budaya yang dipahami dan dihormati oleh seluruh warga.

Temuan ini mendukung konsep *bridging social capital* dari Robert D. Putnam (1993), yaitu jaringan sosial yang mampu menghubungkan kelompok-kelompok berbeda untuk menciptakan kerja sama sosial yang lebih luas. Penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Tumiran dkk. (2024) yang menyatakan bahwa nilai budaya lokal dapat memperkuat efektivitas pelayanan publik berbasis masyarakat.

Gotong Royong dalam Perbaikan Saluran Irigasi

Nilai *To'o Jogho Waga Sama* juga tercermin dalam kegiatan gotong royong masyarakat pada pembangunan dan perbaikan saluran irigasi. Penelitian menemukan bahwa masyarakat secara sukarela terlibat dalam kerja bakti membersihkan saluran irigasi tanpa harus menunggu instruksi formal dari pemerintah. Partisipasi tersebut muncul karena masyarakat menyadari bahwa keberlangsungan irigasi berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup mereka sebagai petani.

Gotong royong menjadi bentuk nyata solidaritas sosial masyarakat dalam menjaga fasilitas publik. Keterlibatan masyarakat dalam kerja bakti juga memperlihatkan adanya rasa tanggung jawab bersama terhadap keberlanjutan pelayanan publik di bidang pertanian dan irigasi. Semangat kolektif tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya bertindak sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai mitra aktif pemerintah dalam proses pembangunan.

Temuan ini mendukung penelitian Vivioli (2021) yang menjelaskan bahwa nilai kearifan lokal dapat meningkatkan motivasi masyarakat dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. Selain itu, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa gotong royong berbasis budaya lokal mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap birokrasi formal dalam pemeliharaan fasilitas publik.

Norma Sosial dalam Pengelolaan Irigasi

Penelitian menemukan bahwa norma sosial menjadi instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan distribusi air irigasi. Norma tersebut diwujudkan melalui prinsip *Pée, Bhuu Sama, Tuku Rabo*, dan *Tura Wiwi* yang mengatur kewajiban, hak, serta perilaku masyarakat dalam pengelolaan irigasi.

Norma sosial tersebut tidak hanya berfungsi sebagai aturan moral, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan sosial yang dijalankan langsung oleh masyarakat. Pelanggaran terhadap aturan distribusi air memperoleh sanksi sosial secara bertahap, mulai dari teguran pribadi, musyawarah kampung, hingga pengucilan sosial. Namun demikian, sistem ini juga menyediakan mekanisme pemulihan hubungan sosial melalui proses penebusan adat dan reintegrasi ke dalam komunitas.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya bersama secara mandiri melalui norma kolektif yang telah diinternalisasi dalam kehidupan sosial mereka. Hal ini sesuai dengan pandangan Elinor Ostrom (1990) yang menjelaskan bahwa komunitas lokal dapat mengelola sumber daya bersama secara efektif melalui norma dan pengawasan sosial berbasis komunitas.

Kewajiban Masyarakat dalam Kerja Bakti Irigasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kewajiban moral untuk berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti pemeliharaan saluran irigasi. Norma *Tuku Rabo* mewajibkan masyarakat untuk hadir dan terlibat dalam kegiatan komunal sebagai bentuk solidaritas sosial. Dalam konteks irigasi, kewajiban tersebut diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam membersihkan saluran, memperbaiki kerusakan, dan menjaga kelancaran distribusi air.

Partisipasi masyarakat dalam kerja bakti menunjukkan adanya kesadaran bahwa keberhasilan pengelolaan irigasi bergantung pada kerja sama seluruh anggota komunitas. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan komunal juga memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan rasa memiliki terhadap fasilitas publik yang digunakan bersama.

Legitimasi dan Dukungan Publik dalam Pelayanan Berbasis Nilai Lokal

Penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik berbasis nilai lokal memperoleh legitimasi dan dukungan yang kuat dari masyarakat. Hal ini terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah desa terkait distribusi air dan pemeliharaan irigasi. Masyarakat merasa lebih dihargai karena dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, nilai *To'o Jogho Waga Sama* juga memperlihatkan karakter inklusif karena seluruh masyarakat, termasuk warga transmigran, memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan komunal dan forum musyawarah desa. Kondisi tersebut memperkuat legitimasi pelayanan publik karena keputusan yang dihasilkan dianggap mewakili kepentingan bersama masyarakat.

Temuan ini mendukung paradigma *New Public Service* yang dikemukakan oleh Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt (2003), yang menekankan bahwa masyarakat harus diposisikan sebagai mitra aktif dalam pelayanan publik. Dengan demikian, pelayanan publik berbasis nilai lokal tidak hanya meningkatkan efektivitas tata kelola irigasi, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai lokal *To'o Jogho Waga Sama* memiliki peran penting dalam meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, khususnya dalam tata kelola irigasi. Nilai kebersamaan, gotong royong, kepercayaan, dan solidaritas mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih partisipatif, transparan, dan dipercaya masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam musyawarah, kerja bakti, serta penyelesaian konflik distribusi air menunjukkan bahwa nilai lokal dapat menjadi modal sosial yang efektif dalam mendukung tata kelola pelayanan publik berbasis masyarakat. Temuan ini sejalan dengan teori modal sosial Robert D. Putnam (1993), Francis Fukuyama (2000), dan konsep *public value* Mark H. Moore (1995) yang menekankan pentingnya kepercayaan, partisipasi, dan legitimasi dalam pelayanan publik.

Saran

Pemerintah desa dan Pemerintah Kabupaten Nagekeo diharapkan dapat mempertahankan serta mengintegrasikan nilai *To'o Jogho Waga Sama* dalam pelayanan publik, terutama melalui penguatan musyawarah masyarakat, pelibatan tokoh adat, dan dukungan terhadap kegiatan gotong royong dalam pengelolaan fasilitas publik. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai penerapan nilai lokal ini pada sektor pelayanan publik lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan desa agar pemanfaatan kearifan lokal dalam tata kelola pemerintahan dapat dilakukan secara lebih luas dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Azzahra, F., & Sulandjari, K. (2022). Analisis modal sosial (*trust, network, and norms*) rumah tangga petani pada masa pandemi COVID-19 di Desa Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 20(2), 1–12. <https://doi.org/10.46937/20202240339>
- Benington, J. (2009). Creating the public in order to create public value? *International Journal of Public Administration*, 32(3–4), 232–249. <https://doi.org/10.1080/01900690902749578>
- Bourdieu, P. (1986). *The forms of capital*. Greenwood Press.
- Bozeman, B. (2003). *Public value mapping of science outcomes: Theory and method: A monograph of the Public Value Mapping Project of the Center for Science, Policy and Outcomes*. Center for Science, Policy and Outcomes.
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95–S120.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). Kajian teori (pp. 167–186).
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). *The new public service: Serving, not steering*. M.E. Sharpe.
- Djandon, M. G. (2022). Kearifan lokal Teki Fe'a Dhadho Radha dalam membangun solidaritas sosial pada masyarakat adat Rendu di Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo. *Historis | FKIP UMMat*, 7(1), 53–61. <https://doi.org/10.31764/historis.v7i1.9318>
- Fukuyama, F. (2000). *Social capital and civil society*. International Monetary Fund.
- Ganarditya, M. Y. (2021). Pengaruh kearifan lokal terhadap pelayanan publik (studi kasus penyelewengan dana bansos). *CENDEKIA Jaya*, 3(2), 10–19. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.185>
- Geertz, C. (1983). *Abangan, santri, priyayi dalam kebudayaan Jawa* (2nd ed.). Dunia Pustaka Jaya.
- Gonda, M. S., Bahfiarti, T., Farid, M., Komunikasi, I., & Hasanuddin, U. (2023). Implementasi komunikasi organisasi berbasis kearifan lokal. *Jurnal Komunikasi*, 6(3), 518–534.
- Granovetter, M., & Swedberg, R. (2018). *The sociology of economic life* (3rd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429494338>
- Laurens, S., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Kristen, U., & Maluku, I. (2025). Inovasi pelayanan publik berbasis kearifan lokal: Studi *best practice* di daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2).
- Meynhardt, T. (2009). Public value inside: What is public value creation? *International Journal of Public Administration*, 32(3–4), 192–219. <https://doi.org/10.1080/01900690902732632>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mite, P. S. (2022). *Transformasi tradisi “To’o Jogho Waga Sama” pada masyarakat Nagekeo-NTT*.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

- Moore, M. H. (n.d.). *Creating public value: Strategic management in government*. Harvard University Press. https://books.google.co.id/books/about/Creating_Public_Value.html?id=Hm9uKVj0qDYC&redir_esc=y
- Naidoo, G., & Holtzhausen, N. (2020). Contextualising public value theory and its measurement in public administration. *Africa's Public Service Delivery and Performance Review*, 28(2), 1–14.
- Nuriyanto, L. K. (2018). Modal sosial dalam membingkai kerukunan umat beragama di Surakarta (studi kasus di Kecamatan Serengan dan Jebres). *Al-Qalam*, 24(2), 271–286. <https://doi.org/10.31969/alq.v24i2.477>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Pantih, S. (2019). Kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 1(1).
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
- Romadi, R., & Kurniawan, G. F. (2017). Pembelajaran sejarah lokal berbasis folklore untuk menanamkan nilai kearifan lokal kepada siswa. *Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 11(1), 79–94.
- Rukin, R., Hakim, L., & Diyanti, F. A. (2024). *Potret pelayanan publik pemerintahan desa*. Widina. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/568505/potret-pelayanan-publik-pemerintahan-desa>
- Shufa, N. K. F. (2018). Pembelajaran berbasis kearifan lokal di sekolah dasar: Sebuah kerangka konseptual. *INOPENDAS: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 1(1), 48–53. <https://doi.org/10.24176/jino.v1i1.2316>
- Sugiyono, P. D. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (15th ed.). Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (3rd ed.). Alfabeta.
- Tumiran, T., Silo, A., Ohoiwutun, Y., & Hijjang, M. A. A. (2024). Aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal suku Kabupaten Puncak Jaya Yabuu Eeruwok and Abelom Eeruwok: The actualization of Lani tribe's local wisdom values in public service process. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 13, 97–111.
- Vivioli, A. (2021). Peran nilai budaya lokal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan daerah. *JIEE*, 1(2), 1–13.
- Wardaniah, R. (n.d.). Kritik terhadap pelayanan publik pemerintah daerah di Indonesia.
- Zakaria, A., Mozin, S., & Nani, Y. N. (2024). Penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan administrasi di Kantor Desa Toto Utara Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(February), 41–47.